

PENCATATAN PERKAWINAN UNTUK KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG SAH

Rema Sri Puji Rahayu¹, H. Hanafi Arief², Afif Khalid³

¹ Ilmu Hukum, 61201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM18810649

Ilmu Hukum, 61201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN0004085801

Ilmu Hukum, 61201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1117048501

Email : puji_puji49@gmail.com

ABSTRAK

Rema Sri Puji Rahayu, Npm. 18.81.0649, dengan judul “*Pencatatan Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Sah*”. dibawah bimbingan Drs. H. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D selaku Pembimbing I dan Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H., selaku pembimbing II.

Kata Kunci : *kedudukan, Mahar Hutang, Insrtuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*

Permasalahan perkawinan antara Machicha Mochtar dengan Moerdiono yang hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu dikenal dengan perkawinan Siri atau disebut sebagai perkawinan di bawah tangan yang tidak diakui secara sah di Indonesia. Mengapa? Karena perkawinan siri atau di bawah tangan tersebut hanya sah dilakukan menurut agama dan keyakinannya saja, tanpa dicatatkan negara, otomatis pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut tidak mendapatkan akta pembuktian telah dilaksanakannya perkawinan, yaitu Akta Perkawinan, dan menurut negara perkawinan siri ini tidak sah.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu kedudukan anak hasil perkawinan yang sah dan perlindungan Hukum yang Diberikan Undang-Undang terhadap Anak Hasil Perkawinan Sah

Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Kedudukan anak hasil perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang tirdaftar secara Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum, Berupa Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai Legalitas kekuatan hukumnya dan perlindungan Hukum yang Diberikan Undang-Undang terhadap Anak Hasil Perkawinan Sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan karena dalam perkawinan yang tidak di catat secara negara tidak dipenuhinya norma hukum dalam suatu perkawinan. Dan

apabila dalam perjalanan kehidupan rumah tangga terjadi ketidak harmonisan, maka pihak yang merasa dirugikan adalah anak karena seorang anak yang pernikahannya tidak didaftarkan berdasarkan pasal 65 ayat A secara undang-undang tidak memenuhi prosedur hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut haknya sebagai anak.

ABSTRACT

Rema Sri Puji Rahayu, Npm. 18.81.0649, with the title "Registration of Marriages for Certainty and Legal Protection of Children Born from Legal Marriages". under the guidance of Drs. H. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D

as Supervisor I and Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H., as supervisor II.

Keywords: *position, dowry debt, Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law*

The problem of the marriage between Machicha Mochtar and Moerdiono, which was only carried out according to their religion and beliefs, is known as a Siri marriage or referred to as a private marriage which is not legally recognized in Indonesia. Why? Because unregistered or unregistered marriages are only valid according to their religion and beliefs, without being registered by the state, automatically the party carrying out the marriage does not receive a certificate proving that the marriage has been consummated, namely a Marriage Certificate, and according to the state this unregistered marriage is invalid.

This research focuses on two problem formulations, namely the position of children resulting from legal marriages and the legal protection provided by law for children resulting from legal marriages.

This research uses normative legal research methods, namely library research methods. Normative legal research methods or library legal research methods are methods or methods used in legal research which are carried out by examining existing library materials.

From this research, the results obtained are that the status of children resulting from a legal marriage according to Law Number 16 of 2019 concerning Marriages which are registered in the State based on Law Number 16 of 2019 regarding amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, marriages which have legal force, in the form of a Marriage Certificate or Marriage Book as legal force and legal protection provided by law for children resulting from legal marriages according to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage because in marriages that are not registered by the state, legal norms are not fulfilled in a marriage. And if in the course of domestic life there is disharmony, then the party who feels disadvantaged is the child because a child whose marriage is not registered based on Article 65 paragraph A does not legally comply with legal procedures and does not have the legal power to claim his or her rights as a child.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah Wasian, 2010, *Akibat Hukum Perkawinan Siri tidak dicatatkan terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang

- Ali Affandi, 2012, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian menurut Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara
- Abdul Ghani Abdullah, 2013, *Pengantar kompilasi hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pers
- Anonomous, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3 edisi Kedua
- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambal*, Jakarta Pustaka Mahmudiyah
- Abdul Gani Abullah, 2009, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Intermedia
- Aulia Rahmat, 2001, *perkawinan yang tidak dicatatkan sah menurut pakar hukum dan yurisprudensi*, Jakarta: CV. Pressindo
- Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Abdul Ghani Abdullah, 2014, *Pengantar kompilasi hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Pers
- Dadi Nurhaedi, 2009, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta, Saujana
- Efii Setiawati, 2012, *Nikah siri tersesat di jalan yang benar*, Bandung : Kepustakaan Eja Insane, cet I
- Fokus Media, 2010, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung
- Hilman Hadikusuma, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Hamdani, 2016, *Risalah Nikah, Alih bahasa Agus Salim*, Jakarta, Pustaka Amami, Cet. ke-1
- Hartono Mardjono, 2010, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, Bandung, Mizan
- Imam Sudiyat, 2013, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- Irma Setyowati Soemitro, 2010, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara
- Khoiruddin Nasution, 2009, *Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS

- Lutfiyah Zeni, 2019, et al, *Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia)*, Yustisia Edisi 91 Januari-April 2015
- Mukhlisin Muzarie, 2002, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika
- Mohd. Idris Ramulyo, 2014, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV
- Nurini Aprilianda, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam proses penyidikan*, Tesis Program Suti Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sulailam Al-Mufarraj, 2008, *Bekal Pernikahan: Hukum*, Jakarta: Qitsti Press
- M. Sujari Dahlan, 2008, *Fenomena Nikah Siri dan Kedudukannya Menurut Agama Islam*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. Ke1
- Masjfuk Zuhdi, 2010, *Nikah Sirri, nikah dibawah tangan dan status anak menurut hukum islam dan hukum positif*, dalam mimbar hukum, Vol 8
- Miftah Farid, 2011, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press
- Mohd. Idris Ramulyo, 2014, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV
- Mukhlisin Muzarie, 2012, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika
- Mulyadi, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.Semarang
- Masjfuk Zuhdi, 2010, *Nikah Sirri, nikah dibawah tangan dan status anak menurut hukum islam dan hukum positif*, Vol 8
- Muhammad Daud Ali, 2009, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1
- M. Idris Ramulyo, 2011, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-2
- R.Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, 2008, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bgai Perempuan*, Penelitian

Supriyadi W. Eddyono, 2015, "*Pengantar Konvensi Hak Anak*", Makalah Pada kursus HAM untuk Pengacara, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta

Summa, Muhammad Amin, 2010, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wahid Hasyim, 2011, *Nikah Sirri da`n dampaknya*, Bandung , PT. Medika Jaya

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam